



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Asahan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perkembangan, dan keadaan pada saat ini sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten Dalam Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 19);
14. Peraturan Bupati Asahan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Asahan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 59) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga keseluruhan Lampiran II menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran IV diubah, sehingga keseluruhan Lampiran IV menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran V diubah, sehingga keseluruhan Lampiran V menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 18 Januari 2019

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 18 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2019 NOMOR 5

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

A. LUAR KABUPATEN LUAR PROPINSI

(dalam rupiah)

| NO | PROPINSI | SATUAN | TARIF HOTEL | | | | |
|-----|------------------|--------|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | BUPATI / WAKIL BUPATI | PIMPINAN DPRD | PEJABAT ESELON II (PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA) / ANGGOTA DPRD | PEJABAT ESELON III (PEJABAT ADMINISTRATOR)/ GOL IV (JABATAN PELAKSANA) | PEJABAT ESELON IV (JABATAN PENGAWAS)/GOL III (JABATAN PELAKSANA) GOL I DAN II |
| 1. | ACEH | OH | 4.000.000 | 2.500.000 | 1.150.000 | 850.000 | 450.000 |
| 2. | R I A U | OH | 3.800.000 | 2.300.000 | 1.050.000 | 868.000 | 450.000 |
| 3. | KEPULAUAN RIAU | OH | 4.000.000 | 2.400.000 | 1.150.000 | 650.000 | 510.000 |
| 4. | J A M B I | OH | 4.000.000 | 2.300.000 | 1.050.000 | 740.000 | 400.000 |
| 5. | SUMATERA BARAT | OH | 5.000.000 | 2.400.000 | 1.010.000 | 890.000 | 520.000 |
| 6. | SUMATERA SELATAN | OH | 4.500.000 | 2.600.000 | 1.100.000 | 630.000 | 560.000 |
| 7. | LAMPUNG | OH | 3.900.000 | 2.200.000 | 1.150.000 | 790.000 | 400.000 |
| 8. | BENGKULU | OH | 1.600.000 | 1.600.000 | 790.000 | 720.000 | 560.000 |
| 9. | BANGKA BELITUNG | OH | 3.000.000 | 1.900.000 | 1.200.000 | 850.000 | 400.000 |
| 10. | B A N T E N | OH | 4.000.000 | 2.300.000 | 1.280.000 | 800.000 | 640.000 |
| 11. | JAWA BARAT | OH | 3.700.000 | 2.800.000 | 1.610.000 | 800.000 | 560.000 |
| 12. | DKI JAKARTA | OH | 8.000.000 | 5.000.000 | 1.500.000 | 870.000 | 610.000 |
| 13. | JAWA TENGAH | OH | 4.000.000 | 2.800.000 | 1.330.000 | 850.000 | 450.000 |
| 14. | DI YOGYAKARTA | OH | 4.000.000 | 2.800.000 | 1.200.000 | 810.000 | 630.000 |

| NO | PROPINSI | SATUAN | TARIF HOTEL | | | | |
|-----|---------------------|--------|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | BUPATI / WAKIL BUPATI | PIMPINAN DPRD | PEJABAT ESELON II (PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA) / ANGGOTA DPRD | PEJABAT ESELON III (PEJABAT ADMINISTRATOR)/ GOL IV (JABATAN PELAKSANA) | PEJABAT ESELON IV (JABATAN PENGAWAS)/GOL III (JABATAN PELAKSANA) GOL I DAN II |
| 15. | JAWA TIMUR | OH | 4.000.000 | 2.400.000 | 1.220.000 | 850.000 | 450.000 |
| 16. | B A L I | OH | 4.500.000 | 3.800.000 | 1.660.000 | 990.000 | 910.000 |
| 17. | NUSA TENGGARA BARAT | OH | 3.500.000 | 2.000.000 | 1.610.000 | 800.000 | 580.000 |
| 18. | NUSA TENGGARA TIMUR | OH | 3.000.000 | 1.800.000 | 900.000 | 750.000 | 550.000 |
| 19. | KALIMANTAN BARAT | OH | 2.400.000 | 2.400.000 | 1.080.000 | 900.000 | 430.000 |
| 20. | KALIMANTAN TENGAH | OH | 3.000.000 | 1.850.000 | 1.410.000 | 750.000 | 560.000 |
| 21. | KALIMANTAN SELATAN | OH | 4.000.000 | 2.400.000 | 1.530.000 | 820.000 | 540.000 |
| 22. | KALIMANTAN TIMUR | OH | 4.000.000 | 2.300.000 | 1.600.000 | 950.000 | 550.000 |
| 23. | KALIMANTAN UTARA | OH | 4.000.000 | 2.300.000 | 1.600.000 | 620.000 | 400.000 |
| 24. | SULAWESI UTARA | OH | 3.500.000 | 1.915.000 | 1.410.000 | 690.000 | 550.000 |
| 25. | GORONTALO | OH | 1.650.000 | 1.620.000 | 1.000.000 | 550.000 | 400.000 |
| 26. | SULAWESI BARAT | OH | 1.650.000 | 1.560.000 | 980.000 | 860.000 | 400.000 |
| 27. | SULAWESI SELATAN | OH | 4.000.000 | 2.500.000 | 1.400.000 | 810.000 | 580.000 |
| 28. | SULAWESI TENGAH | OH | 2.000.000 | 1.800.000 | 1.150.000 | 900.000 | 520.000 |
| 29. | SULAWESI TENGGARA | OH | 1.850.000 | 1.700.000 | 950.000 | 600.000 | 450.000 |
| 30. | MALUKU | OH | 3.000.000 | 1.800.000 | 880.000 | 740.000 | 580.000 |
| 31. | MALUKU UTARA | OH | 3.000.000 | 2.012.000 | 1.370.000 | 600.000 | 480.000 |
| 32. | P A P U A | OH | 2.850.000 | 1.950.000 | 1.340.000 | 760.000 | 460.000 |
| 33. | PAPUA BARAT | OH | 2.750.000 | 1.900.000 | 1.300.000 | 760.000 | 500.000 |

B. LUAR KABUPATEN DALAM PROPINSI

(dalam rupiah)

| NO | KABUPATEN/KOTA | SATUAN | TARIF HOTEL | | | | |
|-----|------------------------------|--------|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | BUPATI / WAKIL BUPATI | PIMPINAN DPRD | PEJABAT ESELON II (PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA) / ANGGOTA DPRD | PEJABAT ESELON III (PEJABAT ADMINISTRATOR)/ GOL IV (JABATAN PELAKSANA) | PEJABAT ESELON IV (JABATAN PENGAWAS)/GOL III (JABATAN PELAKSANA) GOL I DAN II |
| 1. | KAB. BATUBARA | OH | 750.000 | 700.000 | 500.000 | 500.000 | 350.000 |
| 2. | KAB. DAIRI | OH | 1.000.000 | 900.000 | 750.000 | 500.000 | 400.000 |
| 3. | KAB. DELI SERDANG | OH | 1.000.000 | 900.000 | 750.000 | 500.000 | 400.000 |
| 4. | KAB. HUMBANG HASUNDUTAN | OH | 1.000.000 | 900.000 | 750.000 | 500.000 | 400.000 |
| 5. | KAB. KARO | OH | 2.700.000 | 2.500.000 | 1.064.000 | 703.000 | 510.000 |
| 6. | KAB. LABUHAN BATU | OH | 1.000.000 | 900.000 | 750.000 | 500.000 | 400.000 |
| 7. | KAB. LABUHAN BATU SELATAN | OH | 1.000.000 | 900.000 | 750.000 | 500.000 | 400.000 |
| 8. | KAB. LABUHAN BATU UTARA | OH | 750.000 | 700.000 | 500.000 | 500.000 | 350.000 |
| 9. | KAB. LANGKAT | OH | 1.000.000 | 900.000 | 750.000 | 500.000 | 400.000 |
| 10. | KAB. MANDAILING NATAL | OH | 1.000.000 | 900.000 | 750.000 | 500.000 | 400.000 |
| 11. | KAB. NIAS | OH | 1.000.000 | 900.000 | 750.000 | 500.000 | 400.000 |
| 12. | KAB. NIAS BARAT | OH | 1.000.000 | 900.000 | 750.000 | 500.000 | 400.000 |
| 13. | KAB. NIAS SELATAN | OH | 1.000.000 | 900.000 | 750.000 | 500.000 | 400.000 |
| 14. | KAB. NIAS UTARA | OH | 1.000.000 | 900.000 | 750.000 | 500.000 | 400.000 |
| 15. | KAB. PADANG LAWAS | OH | 1.000.000 | 900.000 | 750.000 | 500.000 | 400.000 |
| 16. | KAB. PADANG LAWAS UTARA | OH | 1.000.000 | 900.000 | 750.000 | 500.000 | 400.000 |
| 17. | KAB. PAKPAK BARAT | OH | 1.000.000 | 900.000 | 750.000 | 500.000 | 400.000 |
| 18. | KAB. SAMOSIR | OH | 2.700.000 | 2.500.000 | 1.064.000 | 703.000 | 510.000 |
| 19. | KAB. SERDANG BEDAGAI | OH | 1.000.000 | 900.000 | 750.000 | 500.000 | 400.000 |

| NO | KABUPATEN/KOTA | SATUAN | TARIF HOTEL | | | | |
|-----|-----------------------|--------|--------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | BUPATI / WAKIL BUPATI | PIMPINAN DPRD | PEJABAT ESELON II (PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA) / ANGGOTA DPRD | PEJABAT ESELON III (PEJABAT ADMINISTRATOR)/ GOL IV (JABATAN PELAKSANA) | PEJABAT ESELON IV (JABATAN PENGAWAS)/GOL III (JABATAN PELAKSANA) GOL I DAN II |
| 20. | KAB. SIMALUNGUN | OH | 2.700.000 | 2.500.000 | 1.064.000 | 703.000 | 510.000 |
| 21. | KAB. TAPANULI SELATAN | OH | 1.000.000 | 900.000 | 750.000 | 500.000 | 400.000 |
| 22. | KAB. TAPANULI TENGAH | OH | 1.000.000 | 900.000 | 750.000 | 500.000 | 400.000 |
| 23. | KAB. TAPANULI UTARA | OH | 1.000.000 | 900.000 | 750.000 | 500.000 | 400.000 |
| 24. | KAB. TOBA SAMOSIR | OH | 2.700.000 | 2.500.000 | 1.064.000 | 703.000 | 510.000 |
| 25. | KOTA BINJAI | OH | 1.000.000 | 900.000 | 750.000 | 500.000 | 400.000 |
| 26. | KOTA GUNUNG SITOLI | OH | 1.000.000 | 900.000 | 750.000 | 500.000 | 400.000 |
| 27. | KOTA MEDAN | OH | 5.000.000 | 4.000.000 | 1.500.000 | 703.000 | 510.000 |
| 28. | KOTA PADANGSIDIMPUAN | OH | 1.000.000 | 900.000 | 750.000 | 500.000 | 400.000 |
| 29. | KOTA PEMATANG SIANTAR | OH | 2.700.000 | 2.500.000 | 1.064.000 | 703.000 | 510.000 |
| 30. | KOTA SIBOLGA | OH | 2.700.000 | 2.500.000 | 1.064.000 | 703.000 | 510.000 |
| 31. | KOTA TANJUNG BALAI | OH | 750.000 | 700.000 | 500.000 | 500.000 | 350.000 |
| 32. | KOTA TEBING TINGGI | OH | 1.000.000 | 900.000 | 750.000 | 500.000 | 400.000 |

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

A. Perjalanan Dinas Jabatan yang Dilaksanakan di Luar Kabupaten Luar Propinsi

(dalam rupiah)

| NO | PROPINSI | SATUAN | TINGKAT BIAYA | | | | |
|-----|------------------|--------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | BUPATI / WAKIL BUPATI | PIMPINAN DPRD | PEJABAT ESELON II (PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA) / ANGGOTA DPRD | PEJABAT ESELON III (PEJABAT ADMINISTRATOR)/ GOL IV (JABATAN PELAKSANA) | PEJABAT ESELON IV (JABATAN PENGAWAS) / GOL III, II, DAN I (JABATAN PELAKSANA) |
| 1. | ACEH | OH | 920.000 | 920.000 | 740.000 | 650.000 | 560.000 |
| 2. | R I A U | OH | 920.000 | 920.000 | 740.000 | 650.000 | 560.000 |
| 3. | KEPULAUAN RIAU | OH | 940.000 | 940.000 | 810.000 | 662.000 | 570.000 |
| 4. | J A M B I | OH | 940.000 | 940.000 | 810.000 | 662.000 | 570.000 |
| 5. | SUMATERA BARAT | OH | 920.000 | 920.000 | 740.000 | 650.000 | 560.000 |
| 6. | SUMATERA SELATAN | OH | 920.000 | 920.000 | 740.000 | 650.000 | 560.000 |
| 7. | LAMPUNG | OH | 960.000 | 960.000 | 770.000 | 675.000 | 580.000 |
| 8. | BENGKULU | OH | 940.000 | 940.000 | 810.000 | 662.000 | 570.000 |
| 9. | BANGKA BELITUNG | OH | 940.000 | 940.000 | 810.000 | 662.000 | 570.000 |
| 10. | B A N T E N | OH | 1.060.000 | 1.060.000 | 845.000 | 737.000 | 630.000 |
| 11. | JAWA BARAT | OH | 980.000 | 980.000 | 785.000 | 687.000 | 590.000 |
| 12. | DKI JAKARTA | OH | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 862.000 | 730.000 |
| 13. | JAWA TENGAH | OH | 940.000 | 940.000 | 810.000 | 662.000 | 570.000 |

| NO | PROPINSI | SATUAN | TINGKAT BIAYA | | | | |
|-----|---------------------|--------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | BUPATI / WAKIL BUPATI | PIMPINAN DPRD | PEJABAT ESELON II (PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA) / ANGGOTA DPRD | PEJABAT ESELON III (PEJABAT ADMINISTRATOR) / GOL IV (JABATAN PELAKSANA) | PEJABAT ESELON IV (JABATAN PENGAWAS) / GOL III, II, DAN I (JABATAN PELAKSANA) |
| 14. | DI YOGYAKARTA | OH | 1.040.000 | 1.040.000 | 830.000 | 725.000 | 620.000 |
| 15. | JAWA TIMUR | OH | 1.010.000 | 1.010.000 | 815.000 | 712.000 | 610.000 |
| 16. | B A L I | OH | 1.060.000 | 1.060.000 | 920.000 | 800.000 | 680.000 |
| 17. | NUSA TENGGARA BARAT | OH | 1.080.000 | 1.080.000 | 860.000 | 750.000 | 640.000 |
| 18. | NUSA TENGGARA TIMUR | OH | 1.040.000 | 1.040.000 | 830.000 | 725.000 | 620.000 |
| 19. | KALIMANTAN BARAT | OH | 940.000 | 940.000 | 810.000 | 662.000 | 570.000 |
| 20. | KALIMANTAN TENGAH | OH | 920.000 | 920.000 | 740.000 | 650.000 | 560.000 |
| 21. | KALIMANTAN SELATAN | OH | 940.000 | 940.000 | 810.000 | 662.000 | 570.000 |
| 22. | KALIMANTAN TIMUR | OH | 1.060.000 | 1.060.000 | 845.000 | 737.000 | 630.000 |
| 23. | KALIMANTAN UTARA | OH | 1.060.000 | 1.060.000 | 845.000 | 737.000 | 630.000 |
| 24. | SULAWESI UTARA | OH | 940.000 | 940.000 | 810.000 | 662.000 | 570.000 |
| 25. | GORONTALO | OH | 940.000 | 940.000 | 810.000 | 662.000 | 570.000 |
| 26. | SULAWESI BARAT | OH | 920.000 | 920.000 | 740.000 | 650.000 | 560.000 |
| 27. | SULAWESI SELATAN | OH | 1.060.000 | 1.060.000 | 845.000 | 737.000 | 630.000 |
| 28. | SULAWESI TENGAH | OH | 940.000 | 940.000 | 810.000 | 662.000 | 570.000 |
| 29. | SULAWESI TENGGARA | OH | 960.000 | 960.000 | 770.000 | 675.000 | 580.000 |
| 30. | MALUKU | OH | 920.000 | 920.000 | 740.000 | 650.000 | 560.000 |
| 31. | MALUKU UTARA | OH | 940.000 | 940.000 | 810.000 | 662.000 | 570.000 |
| 32. | P A P U A | OH | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.070.000 | 925.000 | 780.000 |
| 33. | PAPUA BARAT | OH | 1.160.000 | 1.160.000 | 920.000 | 800.000 | 680.000 |

B. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di Luar Kabupaten dalam Propinsi

(dalam rupiah)

| NO | KABUPATEN/KOTA | SATUAN | TINGKAT BIAYA | | | | |
|-----|------------------------------|--------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | BUPATI / WAKIL BUPATI | PIMPINAN DPRD | PEJABAT ESELON II (PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA) / ANGGOTA DPRD | PEJABAT ESELON III (PEJABAT ADMINISTRATOR)/ GOL IV (JABATAN PELAKSANA) | PEJABAT ESELON IV (JABATAN PENGAWAS)/ GOL III, II, DAN I (JABATAN PELAKSANA) |
| 1. | KAB. BATUBARA | OH | 500.000 | 500.000 | 400.000 | 250.000 | 200.000 |
| 2. | KAB. DAIRI | OH | 600.000 | 600.000 | 500.000 | 400.000 | 300.000 |
| 3. | KAB. DELI SERDANG | OH | 720.000 | 720.000 | 540.000 | 450.000 | 360.000 |
| 4. | KAB. HUMBANG HASUNDUTAN | OH | 600.000 | 600.000 | 500.000 | 400.000 | 300.000 |
| 5. | KAB. KARO | OH | 720.000 | 720.000 | 540.000 | 450.000 | 360.000 |
| 6. | KAB. LABUHAN BATU | OH | 600.000 | 600.000 | 500.000 | 400.000 | 300.000 |
| 7. | KAB. LABUHAN BATU SELATAN | OH | 600.000 | 600.000 | 500.000 | 400.000 | 300.000 |
| 8. | KAB. LABUHAN BATU UTARA | OH | 500.000 | 500.000 | 400.000 | 250.000 | 200.000 |
| 9. | KAB. LANGKAT | OH | 600.000 | 600.000 | 500.000 | 400.000 | 300.000 |
| 10. | KAB. MANDAILING NATAL | OH | 600.000 | 600.000 | 500.000 | 400.000 | 300.000 |
| 11. | KAB. NIAS | OH | 600.000 | 600.000 | 500.000 | 400.000 | 300.000 |
| 12. | KAB. NIAS BARAT | OH | 600.000 | 600.000 | 500.000 | 400.000 | 300.000 |
| 13. | KAB. NIAS SELATAN | OH | 600.000 | 600.000 | 500.000 | 400.000 | 300.000 |
| 14. | KAB. NIAS UTARA | OH | 600.000 | 600.000 | 500.000 | 400.000 | 300.000 |
| 15. | KAB. PADANG LAWAS | OH | 600.000 | 600.000 | 500.000 | 400.000 | 300.000 |
| 16. | KAB. PADANG LAWAS UTARA | OH | 600.000 | 600.000 | 500.000 | 400.000 | 300.000 |

| NO | KABUPATEN/KOTA | SATUAN | TINGKAT BIAYA | | | | |
|-----|--------------------------|--------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | BUPATI / WAKIL BUPATI | PIMPINAN DPRD | PEJABAT ESELON II (PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA) / ANGGOTA DPRD | PEJABAT ESELON III (PEJABAT ADMINISTRATOR)/ GOL IV (JABATAN PELAKSANA) | PEJABAT ESELON IV (JABATAN PENGAWAS)/ GOL III, II, DAN I (JABATAN PELAKSANA) |
| 17. | KAB. PAKPAK BARAT | OH | 600.000 | 600.000 | 500.000 | 400.000 | 300.000 |
| 18. | KAB. SAMOSIR | OH | 720.000 | 720.000 | 540.000 | 450.000 | 360.000 |
| 19. | KAB. SERDANG BEDAGAI | OH | 600.000 | 600.000 | 500.000 | 400.000 | 300.000 |
| 20. | KAB. SIMALUNGUN | OH | 720.000 | 720.000 | 540.000 | 450.000 | 360.000 |
| 21. | KAB. TAPANULI SELATAN | OH | 600.000 | 600.000 | 500.000 | 400.000 | 300.000 |
| 22. | KAB. TAPANULI TENGAH | OH | 600.000 | 600.000 | 500.000 | 400.000 | 300.000 |
| 23. | KAB. TAPANULI UTARA | OH | 600.000 | 600.000 | 500.000 | 400.000 | 300.000 |
| 24. | KAB. TOBA SAMOSIR | OH | 720.000 | 720.000 | 540.000 | 450.000 | 360.000 |
| 25. | KOTA BINJAI | OH | 600.000 | 600.000 | 500.000 | 400.000 | 300.000 |
| 26. | KOTA GUNUNG SITOLI | OH | 600.000 | 600.000 | 500.000 | 400.000 | 300.000 |
| 27. | KOTA MEDAN | OH | 1.400.000 | 1.400.000 | 540.000 | 450.000 | 360.000 |
| 28. | KOTA PADANGSIDIMPUAN | OH | 600.000 | 600.000 | 500.000 | 400.000 | 300.000 |
| 29. | KOTA PEMATANG SIANTAR | OH | 720.000 | 720.000 | 540.000 | 450.000 | 360.000 |
| 30. | KOTA SIBOLGA | OH | 720.000 | 720.000 | 540.000 | 450.000 | 360.000 |
| 31. | KOTA TANJUNG BALAI | OH | 500.000 | 500.000 | 400.000 | 250.000 | 200.000 |
| 32. | KOTA TEBING TINGGI | OH | 600.000 | 600.000 | 500.000 | 400.000 | 300.000 |

C. Perjalanan Dinas Jabatan yang Dilaksanakan di Dalam Kabupaten.

Untuk perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di kecamatan dalam wilayah Kabupaten Asahan (kecuali Kec. Kota Kisaran Barat dan Kec. Kota Kisaran Timur) atau perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan dari ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten (kecuali dari Kec. Kota Kisaran Barat dan Kec. Kota Kisaran Timur) diberikan uang harian tanpa uang penginapan sebesar sebagai berikut :

| NO | KECAMATAN | SATUAN | TINGKAT BIAYA |
|----|---------------------------------|--------|---------------|
| | ZONA I | | |
| 1 | KECAMATAN MERANTI | OH | 75.000 |
| 2 | KECAMATAN PULO BANDRING | OH | 75.000 |
| 3 | KECAMATAN AIR JOMAN | OH | 75.000 |
| 4 | KECAMATAN SEI DADAP | OH | 75.000 |
| 5 | KECAMATAN RAWANG PANCA ARGA | OH | 75.000 |
| | ZONA II | | |
| 1 | KECAMATAN TANJUNG BALAI | OH | 100.000 |
| 2 | KECAMATAN BUNTU PANE | OH | 100.000 |
| 3 | KECAMATAN SETIA JANJI | OH | 100.000 |
| 4 | KECAMATAN TINGGI RAJA | OH | 100.000 |
| 5 | KECAMATAN SILAU LAUT | OH | 100.000 |
| 6 | KECAMATAN SIMPANG EMPAT | OH | 100.000 |
| 7 | KECAMATAN AIR BATU | OH | 100.000 |
| 8 | KECAMATAN TELUK DALAM | OH | 100.000 |
| | ZONA III | | |
| 1 | KECAMATAN BANDAR PASIR MANDOGGE | OH | 125.000 |
| 2 | KECAMATAN BANDAR PULAU | OH | 125.000 |
| 3 | KECAMATAN AEK KUASAN | OH | 125.000 |
| 4 | KECAMATAN AEK LEDONG | OH | 125.000 |
| 5 | KECAMATAN AEK SONGSONGAN | OH | 125.000 |
| 6 | KECAMATAN RAHUNING | OH | 125.000 |
| 7 | KECAMATAN PULAU RAKYAT | OH | 125.000 |
| 8 | KECAMATAN SEI KEPAYANG | OH | 125.000 |
| 9 | KECAMATAN SEI KEPAYANG BARAT | OH | 125.000 |
| 10 | KECAMATAN SEI KEPAYANG TIMUR | OH | 125.000 |

D. Untuk perjalanan dinas Pegawai Tidak Tetap (supir) diberikan uang harian termasuk biaya penginapan sebesar Rp. 250.000,-/hari

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.

FASILITAS DAN BATAS TERTINGGI BIAYA TRANSPORT BAGI PELAKSANA SPD

A. FASILITAS TRANSPORT

| NO | PELAKSANA SPD | MODA TRANSPORTASI | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | PESAWAT UDARA | KAPAL LAUT | KERETA API/ BUS | LAINNYA |
| 1. | Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD | Bisnis | VIP / Kelas I A | Eksekutif | Sesuai Kenyataan |
| 2. | Pejabat Eselon II (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama) /Anggota DPRD | Ekonomi | Kelas I B | Eksekutif | Sesuai Kenyataan |
| 3. | Pejabat Eselon III (Pejabat Administrator)/Eselon IV (Jabatan Pengawas)/Golongan III, II, dan I (Jabatan Pelaksana) | Ekonomi | Kelas I B | Eksekutif | Sesuai Kenyataan |

B. BATAS TERTINGGI BIAYA TRANSPORT BUS UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR KABUPATEN DALAM PROPINSI

| NO | TUJUAN | SATUAN BIAYA TIKET BUS (PP) |
|-----|---------------------------|-----------------------------|
| 1. | KAB. BATUBARA | 200.000 |
| 2. | KAB. DAIRI | 400.000 |
| 3. | KAB. DELI SERDANG | 300.000 |
| 4. | KAB. HUMBANG HASUNDUTAN | 400.000 |
| 5. | KAB. KARO | 400.000 |
| 6. | KAB. LABUHAN BATU | 250.000 |
| 7. | KAB. LABUHAN BATU SELATAN | 250.000 |
| 8. | KAB. LABUHAN BATU UTARA | 200.000 |
| 9. | KAB. LANGKAT | 400.000 |
| 10. | KAB. MANDAILING NATAL | 400.000 |
| 11. | KAB. NIAS | 400.000 |
| 12. | KAB. NIAS BARAT | 400.000 |
| 13. | KAB. NIAS SELATAN | 400.000 |
| 14. | KAB. NIAS UTARA | 400.000 |
| 15. | KAB. PADANG LAWAS | 400.000 |
| 16. | KAB. PADANG LAWAS UTARA | 400.000 |
| 17. | KAB. PAKPAK BARAT | 400.000 |
| 18. | KAB. SAMOSIR | 400.000 |
| 19. | KAB. SERDANG BEDAGAI | 300.000 |
| 20. | KAB. SIMALUNGUN | 300.000 |
| 21. | KAB. TAPANULI SELATAN | 400.000 |
| 22. | KAB. TAPANULI TENGAH | 400.000 |
| 23. | KAB. TAPANULI UTARA | 400.000 |
| 24. | KAB. TOBA SAMOSIR | 400.000 |
| 25. | KOTA BINJAI | 400.000 |
| 26. | KOTA GUNUNG SITOLI | 400.000 |
| 27. | KOTA MEDAN | 300.000 |
| 28. | KOTA PADANGSIDIMPUAN | 400.000 |
| 29. | KOTA PEMATANG SIANTAR | 200.000 |
| 30. | KOTA SIBOLGA | 300.000 |
| 31. | KOTA TANJUNG BALAI | 150.000 |
| 32. | KOTA TEBING TINGGI | 300.000 |

C. Untuk perjalanan dinas luar kabupaten dalam propinsi yang menggunakan Kereta Api/Kapal Laut/Pesawat dibayarkan secara *at cost* dengan kelas Eksekutif.

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG